

2026

LAPORAN KINERJA

Triwulan 1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Triwulan I Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta Tahun 2026 dapat diselesaikan,

Laporan ini terdiri dari laporan capaian kinerja dari masing – masing tim kerja yang mendukung indikator kinerja utama yang dituangkan didalam Perjanjian Kinerja antara Kepala BBPK Jakarta dengan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur.

Selain itu laporan ini juga disusun untuk mengetahui kendala yang dihadapi BBPK Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekretariat Jenderal (Setjen) yang melaksanakan pelatihan sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Kementerian dan juga melaksanakan pelatihan sumber daya manusia kesehatan diluar lingkungan Kementerian sesuai kebutuhan Kementerian sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar – besarnya disampaikan kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam penyelesaian laporan kinerja triwulan I BBPK Jakarta tahun 2026 ini.

Semoga penyusunan laporan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam upaya pengembangan BBPK Jakarta kedepan.



Jakarta, 10 April 2026
Kepala,

Muhammad Adiwibowo Soedarmo, ST, M.Han
NIP.196607221989031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
Latar Belakang	3
Maksud dan Tujuan Pengukuran Kinerja	3
Ruang Lingkup	4
BAB II INDIKATOR KINERJA DAN RENCANA AKSI	5
Indikator Kinerja Utama (IKU)	5
Rencana Aksi	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
Capaian Kinerja	8
Analisis Capaian Kinerja	14
Realisasi Anggaran	15
BAB IV PENUTUP	16
Kesimpulan	16
Permasalahan	16
Langkah Perbaikan (Rekomendasi)	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap unit kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Penyusunan laporan kinerja triwulanan pada Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara periodik, khususnya dalam kurun waktu triwulan. Laporan ini menjadi instrument penting dalam memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan telah selaras dengan target yang telah ditetapkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

Laporan triwulan disusun sebagai bentuk monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja organisasi dalam satu tahun anggaran. Melalui laporan ini, pimpinan dapat mengetahui tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan secara lebih dini, sehingga dapat dilakukan langkah – langkah perbaikan apabila terdapat deviasi antara target dan realisasi.

Penyusunan laporan triwulan BBPK Jakarta juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja, permasalahan yang dihadapi, serta upaya tindak lanjut yang dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Dengan demikian, laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai media evaluasi dan dasar pengambilan keputusan dalam perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

B. Maksud dan Tujuan Pengukuran Kinerja

1) Maksud

Maksud dilaksanakannya evaluasi kinerja ini adalah untuk mendapatkan berbagai masukan serta untuk menentukan langkah tindak lanjut dari kegiatan yang akan dilaksanakan.

2) Tujuan

- a. Mengetahui realisasi kegiatan dari masing – masing tim kerja
- b. Mengetahui realisasi atas rencana aksi dan kegiatan serta perjanjian kinerja BBPK Jakarta
- c. Mengetahui hambatan dan permasalahan serta rencana tindak lanjutnya

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi kinerja mencakup pengukuran dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala BBPK Jakarta dengan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur.

BAB II

INDIKATOR KINERJA DAN RENCANA AKSI

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pada tahun 2026, BBPK Jakarta telah menetapkan sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai yang dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
BBPK Jakarta, Tahun 2026

No	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya pelatihan bagi SDM Kesehatan yang dilaksanakan oleh BBPK dan Bapelkes	IKM 17.3.8.1 Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BBPK dan Bapelkes	889 Orang
2	Meningkatnya kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan sesuai standar	IKM 33.3.10.1 Jumlah ASN Kementerian Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	5.000 Orang
		IKM 33.3.10.2 Pengembangan model pembelajaran digital	3 MOOC
		IKM 33.3.10.3 Pelatihan managerial	2 Pelatihan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		IKM 33.3.10.4 Kegiatan pengembangan kompetensi lainnya	25 Kegiatan
		IKM 33.3.10.5 Evaluasi Pasca Pelatihan	3 Pelatihan
		IKM 33.3.10.6 Nilai Kinerja Anggaran satuan kerja	92,75 Nilai
		IKM 33.3.10.7 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja	93,5 Nilai
		IKM 33.3.10.8 Indeks Kepuasan Masyarakat	86 Indeks
		IKM 33.3.10.9 Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,6 Indeks
		IKM 33.3.10.10 Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	3,5 Indeks
		IKD 33.3.10.1 Nilai SAKIP satuan kerja	83 Nilai

No	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		IKD 33.3.10.2 Persentase realisasi anggaran satuan kerja	90 %

Perjanjian Kinerja BBPK Jakarta antara Kepala Balai dan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur tahun 2026 tersaji dalam Lampiran 1.

B. Rencana Aksi

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. BBPK Jakarta menyusun rencana aksi yang dituangkan dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran kinerja. RPK dan RPD ini memberi informasi mengenai jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja.

Dengan adanya RPK dan RPD diharapkan setiap tim kerja di lingkungan BBPK Jakarta dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan kegiatan yang terarah dan terukur sesuai dengan RPK dan RPD yang telah ditetapkan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Triwulan I tahun 2026 merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan BBPK Jakarta dari Januari sampai dengan Maret 2026. Adapun capaian kinerja dari masing – masing indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama s.d Triwulan I
BBPK Jakarta, Tahun 2026

No	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terlaksananya pelatihan bagi SDM Kesehatan yang dilaksanakan oleh BBPK dan Bapelkes	IKM 17.3.8.1 Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BBPK dan Bapelkes	889 Orang	0 Orang	0
2	Meningkatnya kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan sesuai standar	IKM 33.3.10.1 Jumlah ASN Kementerian Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	5.000 Orang	0 Orang	0
		IKM 33.3.10.2 Pengembangan model pembelajaran digital	3 MOOC	0 MOOC	0
		IKM 33.3.10.3 Pelatihan managerial	2 Pelatihan	1 Pelatihan	50

No	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
		IKM 33.3.10.4 Kegiatan pengembangan kompetensi lainnya	25 Kegiatan	2 Kegiatan	8
		IKM 33.3.10.5 Evaluasi Pasca Pelatihan	3 Pelatihan	0 Pelatihan	0
		IKM 33.3.10.6 Nilai Kinerja Anggaran satuan kerja	92,75 Nilai	0 Nilai	0
		IKM 33.3.10.7 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja	93,5 Nilai	73,06 Nilai	78
		IKM 33.3.10.8 Indeks Kepuasan Masyarakat	86 Indeks	88,81 Indeks	103
		IKM 33.3.10.9 Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,6 Indeks	3,665 Indeks	102
		IKM 33.3.10.10 Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	3,5 Indeks	3,478 Indeks	97
		IKD 33.3.10.1 Nilai SAKIP satuan kerja	83 Nilai	0 Nilai	0
		IKD 33.3.10.2	90 %	17,27 %	18

No	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Persentase realisasi anggaran satuan kerja			

Penjelasan lebih detail tentang capaian kinerja masing – masing indikator dapat disampaikan sebagaimana berikut.

IKM 17.3.8.1

Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BBPK dan Bapelkes

Pada tahun 2026, target kinerja yang ditetapkan pada indikator ini adalah sebesar 889 Orang. Sampai dengan bulan Maret tahun 2026 persentase peserta yang mendapatkan pengembangan kompetensi adalah sebesar 0. Hal ini dikarenakan pada triwulan 1 belum ada pelatihan teknis kesehatan bersumber dana PNBPN yang dilaksanakan karena masih berproses revisi informasi kinerja.

IKM 33.3.10.1

Jumlah ASN Kementerian Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya

Pada tahun 2026, target kinerja yang ditetapkan pada indikator ini adalah sebesar 5.000 Orang. Sampai dengan bulan Maret tahun 2026 persentase ASN Kementerian Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya adalah 0 Orang. Selama triwulan 1 sudah berproses Pelatihan Dasar CPNS sebanyak 10 angkatan dengan target 600 Orang. Namun, dikarenakan proses pelatihan yang cukup panjang, pada triwulan 1 belum ada Pelatihan Dasar CPNS yang selesai proses pembelajarannya. Seluruh pembelajaran selesai pada triwulan 2 tahun 2026.

IKM 33.3.10.2**Pengembangan model pembelajaran digital**

Target pada indikator ini adalah sebanyak 3 MOOC. Sampai dengan Maret tahun 2026, BBPK Jakarta masih berproses persiapan pengembangan model pembelajaran digital. Proses pengembangan rencana akan diselesaikan di triwulan 2 dan triwulan 3.

IKM 33.3.10.3**Pelatihan Managerial**

Target pada indikator ini adalah 2 Pelatihan yaitu Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II dan Pelatihan Dasar CPNS. Selama triwulan 1, pelatihan yang sudah berproses yaitu Pelatihan Dasar CPNS.

Dalam satu tahun dilakukan 4 kali survey untuk indeks kepuasan masyarakat. Sampai dengan Maret tahun 2026, nilai yang diperoleh adalah 90,69 atau 107% dari target yang telah ditetapkan.

IKM 33.3.10.4**Kegiatan Pengembangan Kompetensi Lainnya**

Target pada indikator ini pada tahun 2026 adalah sebanyak 25 Kegiatan. Sampai dengan Maret tahun 2026, BBPK Jakarta telah melaksanakan 2 kegiatan pengembangan kompetensi lainnya, yaitu:

1. *Workshop Learning Technology Academy* (LTA)
2. Seminar Sosialisasi Aturan Gratifikasi

IKM 33.3.10.5**Evaluasi Pasca Pelatihan**

Pada tahun 2026, target kinerja pada indikator ini adalah 3 pelatihan. Realisasi sampai dengan Maret 2026 adalah 0. Hal ini dikarenakan pelaksanaan Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) masih dalam proses penyusunan instrument EPP.

IKM 33.3.10.6 **Nilai Kinerja Anggaran**

Nilai Kinerja Anggaran dapat dilihat pada aplikasi Kementerian Keuangan yaitu pada aplikasi smartDJA. smartDJA sudah terintegrasi dengan aplikasi SAKTI. Nilai NKA BBPK Jakarta sampai dengan Maret 2026 adalah 0 karena aplikasi smartDJA tahun 2026 belum rilis dari Kementerian Keuangan.

IKM 33.3.10.7 **Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja**

IKPA atau Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/ Lembaga. Nilai IKPA satker bisa dilihat pada aplikasi omspan menu monev. Terdapat delapan indikator pada penilaian IKPA, yaitu: revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM dan capaian *output*. IKPA dinilai setiap satu bulan sekali.

Nilai IKPA BBPK Jakarta pada triwulan 1 tahun 2026 adalah sebesar 73,06 atau 78% dari target yang telah ditetapkan. Namun, nilai tersebut bukan nilai maksimal dikarenakan komponen penilaian capaian output belum tersedia pada aplikasi SAKTI.

IKM 33.3.10.8 **Indeks Kepuasan Masyarakat**

Target pada indikator ini adalah 86. Dalam satu tahun dilakukan empat kali survei untuk indeks kepuasan masyarakat melalui aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Kemenkes yang disediakan oleh Biro Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat. SIPP mengacu kepada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaan survei, terkadang aplikasi mengalami kendala atau *maintenance*. Jika hal tersebut terjadi, survei tetap dilaksanakan menggunakan aplikasi pengganti yaitu melalui *google form*.

Nilai dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata dari masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Berikut adalah kategori nilai untuk survei indeks kepuasan masyarakat:

Tabel 3.2
Kategori Nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
Berdasarkan Permenpan No.14 Tahun 2017

No	Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	76,61 – 88,30	B	Baik
4	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Hasil survei BBPK Jakarta triwulan 1 tahun 2026 adalah 88,81 atau 103% dari target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas, BBPK Jakarta memiliki mutu pelayanan “Sangat Baik”. Untuk mencapai hal tersebut, BBPK Jakarta berupaya terus memberikan pelayanan yang terbaik dan juga menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi peserta dan seluruh pengguna layanan BBPK Jakarta.

IKM 33.3.10.9 **Indeks Persepsi Anti Korupsi**

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat persepsi masyarakat terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Target pada indikator ini adalah 3,6 dan realisasinya sampai dengan triwulan 1 adalah 3,665 atau 102% dari target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2026, BBPK Jakarta melakukan survey yang dikategorikan kedalam dua kelompok utama yaitu peserta Pelatihan Dasar CPNS dan pengguna eksternal fasilitas BBPK Jakarta seperti individu, organisasi atau instansi diluar internal BBPK Jakarta (masyarakat umum, Kementerian/ Lembaga lainnya, atau pihak

swasta). Responden mengisi kuisisioner yang disediakan oleh penanggung jawab BBPK Jakarta melalui tautan web yang disediakan. Selanjutnya pengolahan data dan analisis dijabarkan secara deskriptif untuk melihat distribusi frekuensi dan data karakteristik responden.

IKM 33.3.10.10

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) merupakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kepuasan dan persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Indeks ini disusun berdasarkan hasil survey kepada pengguna layanan untuk menilai sejauh mana pelayanan publik telah memenuhi harapan masyarakat. IPKP menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan pengguna, serta sebagai dasar dalam melakukan perbaikan berkelanjutan.

Target pada indikator ini adalah 3,6 dan realisasinya pada triwulan 1 tahun 2026 adalah 3,478 atau 97% dari target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2026, BBPK Jakarta melakukan survey yang dikategorikan kedalam dua kelompok utama yaitu peserta Pelatihan Dasar CPNS dan pengguna eksternal fasilitas BBPK Jakarta seperti individu, organisasi atau instansi diluar internal BBPK Jakarta (masyarakat umum, Kementerian/ Lembaga lainnya, atau pihak swasta). Responden mengisi kuisisioner yang disediakan oleh penanggung jawab BBPK Jakarta melalui tautan web yang disediakan.

IKD 33.3.10.1

Nilai SAKIP satuan kerja

Target pada indikator ini adalah 83. Namun pada triwulan 1 belum ada capaian pada indikator ini dikarenakan evaluasi SAKIP baru dilaksanakan pada triwulan 1, yaitu pada bulan April.

IKD 33.3.10.2**Persentase realisasi anggaran satuan kerja**

Total anggaran BBPK Jakarta pada tahun 2026 adalah Rp.32.262.642.000 namun dikarenakan adanya blokir AA direktif presiden, pagu efektif BBPK Jakarta adalah sebesar Rp.31.309.594.000 dengan total realisasi Rp.5.407.183.194 atau 17,27% dari target yang telah ditetapkan yaitu 96%.

B. Analisis Capaian Kinerja

Salah satu hal yang perlu dipantau dalam pengukuran kinerja adalah perbandingan capaian kinerja triwulanan terhadap rencana kinerja selama setahun. Hal ini penting untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian tahun berjalan dan besarnya kesenjangan/ selisih capaian kinerja terhadap target yang harus dicapai dalam setahun.

Berdasarkan data capaian kinerja diatas, dari 13 (tiga belas) IKU BBPK Jakarta, 7 (tujuh) IKU telah ada capaiannya pada triwulan I dan 5 (lima) diantaranya sudah melebihi 25%. Namun, masih ada 6 (enam) IKU yang capaiannya masih 0. Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja pada triwulan 1 belum *on track*, walaupun ada faktor eksternal yang diluar wewenang BBPK Jakarta. Adapun penjelasannya secara rinci adalah sebagai berikut:

1. IKM 17.3.8.1 “Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BBPK dan Bapelkes”, pada indikator ini pelatihan teknis kesehatan bersumber dana PNNP masih ditunda pelaksanaannya karena masih menunggu revisi informasi kinerja
2. IKM 33.3.10.1 “Jumlah ASN Kementerian Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya”, pada indikator ini sudah terlaksana Pelatihan Dasar CPNS sebanyak 10 angkatan dengan target 600 Orang. Namun, dikarenakan proses pelatihan yang cukup panjang, pada triwulan 1 belum ada Pelatihan Dasar CPNS yang selesai, karena seluruh angkatan pada pelatihan tersebut baru selesai di triwulan 2
3. IKM 33.3.10.2 “Pengembangan model pembelajaran jarak jauh”, pada triwulan 1, pengembangan model pembelajaran digital masih tahap persiapan

4. IKM 33.3.10.5 “Evaluasi Pasca Pelatihan”, pada triwulan 1, evaluasi pasca pelatihan masih dalam tahap penyusunan instrument dan EPP akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
5. IKM 33.3.10.6 “Nilai Kinerja Anggaran satuan kerja”, aplikasi SmartDJA tahun 2026 belum rilis dari Kementerian Keuangan pada triwulan 1 tahun 2026, sehingga petugas monev belum dapat melihat NKA pada *dashboard* aplikasi SmartDJA
6. IKD 33.3.10.1 “Nilai SAKIP satuan kerja”, evaluasi SAKIP baru dilaksanakan pada bulan April yaitu pada triwulan 2 tahun 2026.

C. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran BBPK Jakarta pada tahun 2026 adalah Rp.32.262.642.000 namun dikarenakan adanya blokir AA direktif presiden, pagu efektif BBPK Jakarta adalah sebesar Rp.31.309.594.000 dengan total realisasi Rp.5.407.183.194 (17,27%).

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja BBPK Jakarta sampai dengan triwulan I tahun 2026 antara lain:

1. Capaian kinerja BBPK Jakarta sampai dengan triwulan I tahun 2026 masih belum *on track* dikarenakan sebagian indikator belum ada capaiannya dikarenakan adanya faktor hambatan baik dari eksternal maupun internal
2. Sebanyak 7 (tujuh) dari 13 (tiga belas) IKU telah dilakukan pengukuran.
3. Realisasi anggaran BBPK Jakarta sampai dengan triwulan I tahun 2026 adalah sebesar Rp.5.407.183.194 (17,27%)

B. Permasalahan

Dalam melaksanakan kinerjanya sampai dengan triwulan I, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BBPK Jakarta, yaitu:

1. Adanya penundaan pelaksanaan kegiatan bersumber dana PNPB dan pembayaran Pelatihan Dasar CPNS bersumber dana rupiah murni dikarenakan menunggu revisi informasi kinerja yang belum selesai sampai dengan triwulan 1 berakhir
2. Adanya pembaharuan pada beberapa aplikasi monitoring dan evaluasi dari Kementerian Keuangan, namun semua fitur belum bisa digunakan maksimal pada triwulan 1

C. Langkah Perbaikan (Rekomendasi)

Terhadap beberapa kendala/ permasalahan yang ada dan sebagai bentuk perbaikan kedepan, BBPK Jakarta akan melakukan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Eselon 1 dan Biro Perencanaan untuk percepatan revisi atau alternatif agar kegiatan bisa terlaksana pada triwulan 2
2. Berkoordinasi dengan PIC dari Kementerian Keuangan atau melalui eselon 1 agar aplikasi monitoring dan evaluasi dapat dimanfaatkan dengan maksimal